

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ARIFANDI RAMBE

NIM. 52153049

**PROGRAM STUDI
AKUNTANSI SYARIAH**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN
Sumatera Utara*



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Arifandi Rambe**
Nim : 52153049
Tempat/tgl. Lahir : Medan, 01 Agustus 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Tuba II Gg. Tapanuli Lr. Tapsel No.2 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 03 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



Muhammad Arifandi Rambe

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG**

Oleh:

Muhammad Arifandi Rambe

Nim. 52153049

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 03 Desember 2019

Pembimbing I




Yusrizal, M.Si
NIP. 197505222009011006

Pembimbing II



Rahmat Daim Hrp, M.Ak
NIP. 199009262018031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, SE., M.Pd
NIP. 19730510 1998031003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG" an. Muhammad Arifandi Rambe, NIM 52153049 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munagasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 19 Desember 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 19 Desember 2019
Panitia Sidang Munagasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Dr. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003

Sekretaris,



Rahmi Syahriza, S.Th.I., MA
NIP. 198501032011012011

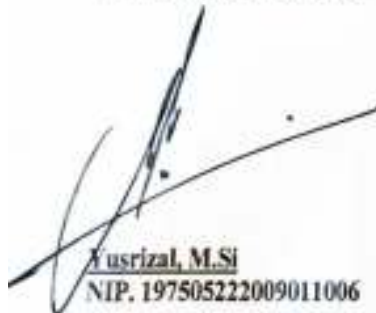
Anggota



Dr. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003



Rahmi Syahriza, S.Th.I., MA
NIP. 198501032011012011



Yusrizal, M.Si
NIP. 197505222009011006



Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIP. 199009262018031001



ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang**” Oleh Muhammad Arifandi Rambe dibawah bimbingan Skripsi Bapak Yusrizal, M.Si dan Pembimbing II Bapak Rahmat Daim, M.Ak.

Fenomena menurunnya kinerja keuangan merupakan salah satu masalah ekonomi makro yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan permasalahan yang ada, jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Deli Serdang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan *pooled data* yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section* yang tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara periode 2010-2018. Pengolahan data penelitian ini menggunakan bantuan program Microsoft Excel. Analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio kemandirian, analisis rasio efisiensi, analisis rasio keserasian dan analisis rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan rata-rata rasio kemandirian keuangan kinerja keuangan kabupaten Deli Serdang masih jauh dibawah harapan. Begitu pula berdasarkan rasio efisiensi, kinerja keuangan daerah kabupaten Deli Serdang kurang efisien dalam mengalokasikan belanja daerah. Namun secara umum, berdasarkan rasio keserasian kabupaten Deli Serdang sesuai dengan proporsional kinerja keuangan. Kemudian berdasarkan rasio pertumbuhan, kinerja keuangan kabupaten Deli Serdang periode 2010-2018 mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerahnya.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dengan menyelesaikan skripsi ini penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang bersedia membantu dan membimbing baik secara moral, moril maupun materi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A beserta jajarannya terkhusus pada Wakil Dekan I,II, dan III. Serta seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama penulis belajar di kelas.
3. Bapak Hendra Harmain, SE.,M.P.d selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibunda Kusmilawaty, SE, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan baik moral, moril maupun materil.
5. Terutama kepada Bapak Yusrizal, M.Si selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Rahmat Daim, M.Ak selaku pembimbing skripsi II yang telah

membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini serta berkat bimbingan para beliau inilah skripsi saya ini bisa sampai pada tahap terakhir atau sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan akan bermanfaat bagi semua orang, khususnya untuk penulis secara pribadi.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah memberikan pencerahan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
7. Khusus kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan agar tetap semangat dalam menjalani pendidikan.
8. Kepada sahabat saya Yohana Manik, S.E yang selalu memotivasi untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Untuk Euis Desy Khairiyati, S.Kom yang menjadi motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebab janji wisuda bareng tapi tidak terlaksana pada November kemarin.
10. Untuk Abangda Solahuddin Tanjung, dan teman lainnya yang sudah membekali diri saya ilmu yang tidak didapat di perkuliahan.
11. Kepada ketua-ketua umum demisioner dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), karena dengan arahan dan bimbingan, penulis dapat berproses dan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan dalam aktivitas perkuliahan.
12. Kepada ketua umum demisioner Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum Sahabat Wahyu Amri Purba yang selalu setia berproses bersama dalam suka maupun duka.
13. Kepada ketua umum Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) abangda Fachri Pradana yang merangkul saya untuk berproses di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

14. Kepada teman-temanku Keluarga Besar AKS - B angkatan 2015 yang sudah bersama-sama berjuang selama 4 tahun untuk sampai ketahap akhir. Semoga kita semua menjadi Sarjana yang bermanfaat.
15. Untuk semua teman dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah Swt melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan hati bapak/ibu serta rekan-rekan sekalian dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis secara pribadi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan penulis mengharapkan kririk dan saran yang bersifat membangun diri seluruh pihak untuk kemaksimalan skripsi ini.

Medan, 03 Desember 2019

Penulis

Muhammad Arifandi Rambe

Nim. 52.15.3.049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS	13
A. Keuangan Negara.....	13
B. Analisis Kinerja	18
C. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	18
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	20
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	23
3. Rasio Keserasian	24
4. Rasio Pertumbuhan	26
D. Pendapatan Asli Daerah.....	27
E. Dana Perimbangan (Transfer).....	30
F. Keuangan Negara Dalam Perspektif Islam	40
G. Penelitian Terdahulu	48
H. Kerangka Teoritis	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data.....	53
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	53

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data	54
BAB IV Analisis Data dan Hasil Penelitian	56
A. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang	56
1. Geografis	56
2. Administratif.....	56
3. Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang	58
4. Institusi dan Organisasi Pemerintahan	59
B. Hasil Penelitian	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	hal
1.1 Rasio Keuangan	6
2.1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah	23
2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	24
2.3 Penelitian Terdahulu	48
4.1 Rasio Kemandirian Kabupaten Deli Serdang	59
4.2 Rasio Efisiensi Kabupaten Deli Serdang	61
4.3 Rasio Keserasian Kabupaten Deli Serdang.....	62
4.4 Rasio Pertumbuhan Kabupaten Deli Serdang.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar.....	hal
Kerangka Teoritis.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Data Penelitian	74
2. Hasil Pengolahan Data	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sebelumnya membawa dampak pada relatif kecilnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 mengakibatkan kurang mampu membantu daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan UU No. 5 Tahun 1974 cenderung bersifat sentralistik dan membatasi berbagai kewenangan daerah yang penting. Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Dalam hal ini, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.¹

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen sehingga sebagai konsekuensinya dikeluarkan Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan,

¹ Abdul Halim, *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama* (Yogyakarta: UMP AMP YKN, 2001), h.167

Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi UU NO. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah munculah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Maksudnya adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua undang-undang tersebut mengandung penekanan bahwa adanya proses yang lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat akan terlayani dengan baik oleh pemerintah. Selain itu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan.

Realisasi pendapatan pemerintah daerah (Pemda) 17 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada triwulan IV 2015 mencapai Rp16,6 triliun atau 96,1% dari anggaran pendapatan 2015. Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi dari capaian 2014 yang tercatat sebesar Rp16,2 triliun. Namun secara persentase, realisasi pendapatan ke 17 kabupaten/kota tersebut masih lebih rendah dari capaian 2014 yang mencapai 108% dari target anggaran pendapatan.²

Peningkatan pendapatan secara nominal terjadi pada komponen PAD dan Transfer, sementara komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurun.

² KEKR Provinsi Sumatera Utara Bank Indonesia h.47

Meningkatnya PAD didorong oleh peningkatan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini menunjukkan perbaikan rasio kemandirian fiskal Pemda 17 Kabupaten/Kota tersebut, dari 3,3% tahun 2014 menjadi 3,9%, meskipun masih rendah. Rasio kemandirian fiskal merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan. Rendahnya rasio kemandirian fiskal ini mencerminkan masih besarnya ketergantungan Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Rasio kemandirian fiskal tertinggi dicatat oleh Kabupaten Deli Serdang sebesar 28,5%, sedangkan terendah adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar 3,6%. Tingginya rasio kemandirian Kabupaten Deli Serdang disebabkan oleh tingginya pendapatan Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari pajak industri pengolahan yang banyak terdapat di wilayah tersebut, salah satunya adalah Kawasan Industri KIM Star di Tanjung Morawa.

Dari sisi belanja daerah, 17 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara telah membelanjakan Rp17,1 triliun atau 95,7% dari anggaran belanja 2015. Sebagaimana pendapatannya, realisasi belanja tersebut secara nominal juga lebih tinggi dari tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp15,2 triliun. Namun secara prosentase masih di bawah realisasi 2014 yang mencapai 97,1% dari plafon. Rendahnya prosentase realisasi belanja 2015 tidak terlepas dari kondisi politik terkait pelaksanaan Pilkada serentak dan terlambatnya persetujuan P-APBD 2015. Komponen belanja yang terbesar adalah belanja pegawai yang mencapai Rp9 triliun (52,7% dari anggaran), belanja modal sebesar Rp3,6 triliun (21,5% dari anggaran), dan belanja barang dan jasa sebesar Rp2,8 triliun (16,8% dari anggaran).

Hingga triwulan IV 2015, penerimaan pajak terealisasi Rp640 miliar, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp537 miliar. Penerimaan pajak tersebut hanya mencapai 85% dari yang ditargetkan pada tahun 2015, namun lebih tinggi dari capaian 2014 yang hanya tercapai 80% dari target penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak tertinggi secara nominal diraih oleh Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp368 miliar (80% dari target sebesar Rp463

miliar). Sejalan dengan penerimaan pajaknya, secara nominal Kabupaten Deli Serdang memiliki realisasi anggaran belanja tertinggi hingga akhir tahun 2015 sebesar Rp2,66 triliun (81,8% dari pagu).

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 tahun 2004).

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data dan fakta keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut), baik APBD provinsi maupun kabupaten/kota masih tergantung pemerintah pusat. Bank Indonesia (BI) mencatat, dari sisi pendapatan, keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung dari transfer dana perimbangan, sehingga kemandirian fiskal masih sangat kurang.

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, rasio PAD terhadap pendapatan cenderung menurun, bahkan pada tahun 2017 kemandirian fiskal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tercatat 18,7% atau masuk dalam kategori kurang. "Minimal rasionya harus di atas 40% baru bisa mendapat kategori baik," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Sumut Arief Budi Santoso kepada Medan Bisnis.³

Fenomena ini menjelaskan bagaimana daerah merespon kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun tanpa diikuti dengan peningkatan PAD-nya. Dalam konteks ideal, peningkatan anggaran pendapatan

³ <http://www.mdn.biz.id/n/304370> di akses pada 06 Februari 2019 Pukul 21:07 WIB

seharusnya sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang berujung pada potensi peningkatan pajak daerah.

Namun realitanya, dana perimbangan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan penyediaan layanan kepada masyarakat, justru lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta penyelenggaraan infrastruktur yang berlebihan dari pemerintah pusat mungkin berdampak besar terhadap kemandirian keuangan, sehingga terjadi inefisiensi penggunaan dana transfer dan terjadi asimetri yang dikenal dengan flypaper effect.

Hampir seluruh wilayah di Sumut memiliki rasio kemandirian fiskal dengan kategori sangat kurang, di bawah 10%. Kota Medan sebagai pusat aktivitas ekonomi Sumut memiliki rasio kemandirian fiskal yang jauh lebih baik (37,5%) dibandingkan kabupaten Nias Selatan yang hanya 1,2%.

Selain itu, hanya ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki rasio kemandirian fiskal di atas 10%, yaitu Deli Serdang, Labuhan Batu, Binjai, Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebingtinggi, dan Padangsidimpuan.

Dengan demikian, peranan PAD masih perlu ditingkatkan. Tidak hanya bersumber dari pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan baru, salah satu diantaranya melalui pengelolaan BUMD dan pemberdayaan dana desa.

Dia merinci, “nilai pagu pendapatan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumut mencapai Rp52,5 triliun, yang didukung oleh subkomponen utama dana perimbangan sebesar 69,4% atau Rp36,5 triliun, disusul dengan pendapatan asli daerah 18,7% atau sebesar Rp9,8 triliun, dan lain-lain PAD yang sah 11,9% atau sebesar Rp6,2 triliun”.

Dari sisi belanja, pagu anggaran keuangan daerah 2017 mayoritas masih digunakan untuk belanja tidak langsung dengan porsi 58% atau sebesar Rp31,5 triliun dan belanja langsung 42% sebesar Rp23,2 triliun. Sub komponen belanja tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai Rp19,5 triliun, disusul dengan bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota sebesar Rp5,4 triliun, belanja hibah Rp4,1 triliun dan Bagi hasil kepada pemprov/kabupaten/kota Rp2,1 triliun.

Sementara biaya langsung didominasi oleh belanja barang dan jasa Rp10,7 triliun, belanja modal Rp10,3 triliun dan belanja pegawai langsung Rp2,1 triliun.

Berdasarkan data Laporan Bank Umum posisi triwulan IV-2016, secara spasial tercatat bahwa proporsi kredit dan/atau pembiayaan terbesar di Sumatera Utara terdapat di kota Medan dengan proporsi sebesar 56,5% disusul oleh Kabupaten Deli Serdang sebesar 14,9% dan Kabupaten Asahan sebesar 3,4%. Sementara itu, dari sisi kepemilikan rekening kredit, proporsi terbesar adalah Kota Medan dengan proporsi sebesar 29,9%, Kabupaten Deli Serdang sebesar 15,4% dan Kabupaten Asahan sebesar 5,5%. Di sisi lain, berdasarkan pertumbuhan kredit, pertumbuhan kredit terbesar di Kota Sibolga sebesar 77% (yoy), disusul oleh Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Labuhan Batu Utara masing-masing tumbuh sebesar 67% (yoy) dan 39% (yoy). Sebagaimana halnya DPK, sebaran kredit di Sumatera Utara juga masih belum merata sehingga turut berdampak pada tidak meratanya pertumbuhan perekonomian di berbagai daerah.⁴

Selanjutnya ada kemandirian fiskal di atas 10%. Tetapi semuanya didominasi oleh wilayah perkotaan. Artinya secara keseluruhan pusat bisnis itu masih ada di perkotaan, bukan di tingkat kabupaten. Kepadatan penduduk dan akses layanan yang lebih baik menjadikan kota di Sumut memiliki daya tarik dibandingkan pengembangan ekonomi di kabupaten.

TABEL 1.1 Rasio Keuangan Kab. Deli Serdang

NO	TAHUN	Rasio Kemandirian	Rasio Efisiensi	Rasio Kesenjangan	Rasio Pertumbuhan
1	2015	34,09	530,88	17,97	11,3
2	2016	38,92	524,49	18,67	6,58
3	2017	30,47	397,71	21,95	-1,43

Sumber : KEKR Provinsi Sumatera Utara Bank Indonesia, 2017

Ini tantangan Bupati untuk mengembangkan wilayahnya. Dan juga tantangan buat wilayah perkotaan untuk mencapai target 40%. Untuk itu memang dibutuhkan sebuah upaya agar wilayah di pemerintahan tingkat II seperti

⁴ KEKR Provinsi Sumatera Utara Bank Indonesia, h.70

kabupaten diarahkan untuk menjadi basis pengembangan industri selanjutnya. Salah satu yang diupayakan adalah dengan mengintensifkan industri berbasis pertanian.

Penyebaran industri sebaiknya sama rata. Artinya pengembangan industri di kabupaten khususnya industri pengolahan ataupun industri hilir bisa dikembangkan di daerah-daerah. Yang penting infrastrukturnya tersedia serta merata, dan akses logistiknya mencukupi.

Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam.

Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan.

Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Deli Serdang juga memiliki keanekaragaman budaya, yang disemarakkan oleh hampir semua suku-suku yang ada di Nusantara. Dahulu, wilayah ini disebut Kabupaten Deli dan Serdang, dan pemerintahannya berpusat di Kota Medan. Memang dalam sejarahnya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (kesultanan) yaitu Kesultanan Deli berpusat di Kota Medan, dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Pada tanggal 14 November 1956. Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom dan namanya berubah menjadi Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang-Undang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956. Untuk merealisasikannya dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibu kota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatra Utara tanggal 23 Desember 1986. Demikian pula pergantian pimpinan di daerah ini pun telah terjadi beberapa kali. Daerah ini, sejak terbentuk

sebagai kabupaten sampai dengan tahun tujuh puluhan mengalami beberapa kali perubahan luas wilayahnya, karena Kota Medan, Tebing Tinggi dan Binjai yang berada di daerah perbatasan pada beberapa waktu yang lalu meminta/mengadakan perluasan daerah, sehingga luasnya berkurang menjadi 4.397,94 km².

Diawal pemerintahannya Kota Medan menjadi pusat pemerintahannya, karena memang dalam sejarahnya sebagian besar wilayah kota Medan adalah “Tanah Deli” yang merupakan daerah Kabupaten Deli Serdang. Sekitar tahun 1980-an, pemerintahan daerah ini pindah ke Lubuk Pakam, sebuah kota kecil yang terletak di pinggir Jalan Lintas Sumatra lebih kurang 30 kilometer dari Kota Medan yang telah ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Deli Serdang.

Pada tahun 2004, Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan lahirnya Kabupaten baru Serdang Bedagai sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka luas wilayahnya sekarang menjadi 2.394,62 km² terdiri dari 22 kecamatan dan 403 desa/kelurahan, yang terhampar mencapai 3,34% dari luas Sumatra Utara.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan sehingga dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu mereka.⁵

⁵ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Edisi Dua*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), h.87

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Selain PAD, kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor diantaranya, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah” dengan sampel yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang**. Selain itu, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data selama delapan periode tahun yaitu Tahun Anggaran 2010-2018.

B. Batasan Masalah

1. Aspek penelitian ini adalah Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan laporan APBD KAB Deli Serdang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten Deli Serdang dilihat dari rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan dari tahun 2010-2018?

⁶ Bratakusumah dan Solihin, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2002), h.169

2. Bagaimana rata-rata kinerja keuangan daerah kabupaten deli serdang dari tahun 2010-2018?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah kabupaten Deli Serdang dilihat dari rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan dari tahun 2010-2018.
- b. Untuk menganalisis rata-rata kinerja keuangan daerah kabupaten Deli Serdang dari tahun 2010-2018.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menerapkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan, adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari teori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan dan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah

Kabupaten Deli Serdang. Bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk memberikan sumbangan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya/potensi daerah.

b. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah di dalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang berisi tentang pembahasan atas teori serta rumusan-rumusan masalah yang menjadi pertanyaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian, membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Merupakan bagian analisis dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisa dan data dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Keuangan Negara

Keuangan (finance) mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya.⁷ Pendapat tentang keuangan terakhir datang dari Ridwan dan Inge, mereka mengemukakan bahwa keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.

Dalam konteks keuangan negara, terdapat banyak variasi pengertian keuangan negara, tergantung aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli bidang keuangan negara.⁸ Berikut ini ditunjukkan pengertian dari beberapa pendapat para ahli.

1. Menurut M. Ichwan

Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif yang akan dijalankan untuk masa yang akan datang, atau lazimnya satu tahun mendatang.

2. Menurut Van Deer Kemp

Keuangan negara adalah semua hak yang yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

3. Menurut Geodhart

Keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ W.Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta : Grafindo, 2012), h.,18

melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Ekonomi di Indonesia bermacam-macam diantaranya adalah Keuangan. Keuangan di Indonesia diatur oleh Kementerian Keuangan Indonesia yang membidangi keuangan dan kekayaan negara.

Kondisi perekonomian negara akan selalu terkait erat dengan faktor keuangan yang dimilikinya. Karena keuangan ini begitu penting, maka setiap individu yang berperan dalam pemerintahan harus memahami tentang konsepnya.

Berikut adalah fungsi dari keuangan negara, yakni :

1. Fungsi hukum tata negara (*dee straaetheelijke functie*) : alat otorisasi dan alat memilih (*keuze functie*) sejumlah alternatif (kepentingan dan anggaran kegiatan)
2. Fungsi teknis pengurusan/ mikro ekonomis
3. Fungsi makro ekonomis.⁹

Keuangan negara juga memiliki 2 jenis yaitu keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, berikut penjelasan nya.

1. Keuangan Pusat

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam bab V dan VI undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa :

- a. Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter;
- b. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah;

⁹*Ibid.*, h..32

- c. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Asing atau sebaliknya (dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat);
- d. Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain (dengan persetujuan DPRD);
- e. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah yang terlebih dahulu harus ditetapkan dalam APBN/APBD;
- f. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara;
- g. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah;
- h. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR;

2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Sesuai ketentuan peraturan

perundangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota Perhitungan Anggaran. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, sampai pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan bagi pemerintah daerah di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.¹⁰

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan perlindungan masyarakat (*protective function*). Di samping itu, sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki oleh daerah akan menentukan tingkat kemandirian keuangannya.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹¹ Hal-hal yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Lalu ada kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah. APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (2)

¹¹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, (Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat :2007),

efektivitas pemerintah daerah. APBD adalah wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara umum. Komponen APBD secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. Dana perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti hibah atau dana darurat.
2. Anggaran Belanja Daerah yang terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
 - b. Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
3. Anggaran Pembiayaan, yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Jenis-jenis dari pembiayaan daerah adalah :
 - a. Penerimaan pembiayaan, di mana mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan

kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah;

Pengeluaran pembiayaan, di mana mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

B. Analisis Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Sedangkan Kinerja berarti sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Mathis dan Jackson menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Dari arti kata di atas dapat disimpulkan bahwa Analisis Kinerja menurut kamus besar Bank Indonesia berarti menganalisis (menyelidiki) terhadap suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui keadaan sebenarnya atas pencapaian ataupun prestasi yang diraih.¹²

C. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum

¹² Kamus Bank Indonesia

banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.¹³

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut : DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja. Kinerja anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan anggaran kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah selaku manajer eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah ada berbagai macam. Salah satunya adalah analisis surplus/defisit APBD.

Analisis surplus defisit APBD adalah salah satu tugas menteri keuangan dirjen perimbangan keuangan dalam rangka memantau kebijakan fiskal di pemerintah daerah. Tugas ini tercermin dalam PP 23 Tahun 2003, PP 58 Tahun 2005, PMK No.45 Tahun 2006, dan PMK No. 72 Tahun 2006. Hasil analisis

¹³ Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.(Yogyakarta: BPFE, 2012), h.135

tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk pengambilan kebijakan fiskal secara nasional untuk tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan analisis difokuskan pada ketaatan pada kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta komposisi penyebaran dalam skala defisit yang diperbolehkan dan surplus pada masing-masing pemerintahan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustina dalam jurnalnya, kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Analisis ini juga menyajikan dua pendekatan dalam penentuan defisit yaitu pertama pendekatan dasar sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 adalah selisih antara pendapatan dan belanja, sedangkan definisi defisit pendekatan lanjutan sesuai dengan PMK No.72 Tahun 2006 adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Pada penelitian ini, kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan analisis surplus defisit.

Rumus yang digunakan untuk menghitung surplus/defisit APBD adalah sebagai berikut:

$$\text{Surplus/Defisit} = \text{Pendapatan Daerah} - \text{Belanja Daerah}^{14}$$

Kinerja keuangan daerah ditentukan berdasarkan rasio keuangan, berikut ini dijelaskan beberapa rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah tersebut.

¹⁴ PMK No.72 Tahun 2006

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa “kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi”.¹⁵

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah atau dapat dikatakan daerah tersebut semakin mandiri, demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah atau dapat dikatakan daerah tersebut

¹⁵ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

semakin mandiri, demikian pula sebaliknya.¹⁶ Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus 2.1

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Daerah}} \times 100\%$$

Secara konsepsional, pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat jenis pola hubungan hubungan situasional tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yaitu:

1. Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian keuangan pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan Konsultatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap telah sedikit dapat melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan Partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

¹⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat :2007), h.232

Tabel 2.1.
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian,
dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Halim, 2007

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.¹⁷

¹⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, (Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat :2007).h.234

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

Rumus 2.2

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mohammad Mahsun, 2012

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria	Rasio Efisiensi
Efisiensi	(%)
Tidak Efisien	>100%
Efisiensi Berimbang	100%
Efisien	<100%

Sumber : Mohammad Mahsun, 2012:187

3. Rasio Kesenjangan

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.¹⁸ Ada dua perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu : rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total

¹⁸ *Ibid.*, h236

belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah.¹⁹ Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

Rumus 2.3

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sumber : Mahmudi, 2010

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio Belanja Modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rumus 2.4

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sumber : Mahmudi, 2010

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode

¹⁹ Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Edisi Dua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta : 2010), h.164

anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.²⁰ Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

Rumus 2.5

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Sumber : Halim, 2007

Keterangan :

R : Rasio Pertumbuhan

P_n : Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun Ke- n.

P₀ : Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung sebelum tahun ke – 0.

Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Jika semakin tinggi nilai TPD,

PAD, dan belanja operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

²⁰ Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik*, (Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat :2007), h.241

D. Pendapatan Asli Daerah

Definisi pendapatan asli daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".²¹

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian, usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, yang tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk

²¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah* Pasal 1 Angka 18

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wewenang pungutan pajak daerah berada di tangan pemerintah daerah.

Pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Aturan pelaksanaannya sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Dasar hukum dan teknis pemungutan pajak dan retribusi pemerintah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).²²

Dasar hukum pajak daerah adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dan mempunyai tujuan :²³

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggara otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian pada dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pajak daerah.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 pajak yang dikelola daerah ada dua jenis:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari ;
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok.
- 2) Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan

²² Diaz Priantara, *PERPAJAKAN INDONESIA*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), h.556

²³ Undang-Undang No 28 Tahun 2009

- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung wallow
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perizinan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan untuk diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- a. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
- f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

E. Dana Perimbangan (Transfer)

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.²⁴ Berikut macam-macam dana perimbangan dan penjelasan nya.

1. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 UU No. 33 Tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Perimbangan diakses pada 10/08/2019 pukul 23:20

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendalami kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kata „umum“ dalam DAU mengandung pengertian bahwa DAU merupakan *block grant* yang artinya kewenangan pengaturan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah.²⁵

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksud untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Tujuan dari transfer ini adalah untuk menutupi kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan pusat serta antar daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana alokasi umum merupakan salah satu komponen di dalam dana perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dengan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi/kapasitas daerah (*fiscal capacity*).

Dana alokasi umum (DAU) dapat diartikan sebagai berikut:

- a. komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
- b. Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalances, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah,

²⁵ Pasal 1 ayat 21 UU No. 33 Tahun 2004

- c. *equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangann dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber daya alam yang diperoleh daerah.

Dana Alokasi Umum mempunyai bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut.

- a) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
- b) Dana Alokasi Umum untuk daerah Kabupaten/Kota.²⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 200 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.²⁷

DAU ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. 10% untuk DAU daerah provinsi, 90% untuk daerah kabupaten/kota.

- a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi

DAU ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN, 10 % untuk DAU daerah provinsi.

- b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

DAU ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN, 90 % untuk DAU daerah kabupaten/kota.

Apabila Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh daerah lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan daerah tersebut maka hal tersebut berarti tingkat kemandirian keuangan daerah

²⁶ Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Erlangga , 2004), h.30

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2000

tersebut masih rendah atau dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum mandiri sebab masih bergantung pada DAU dari pemerintah pusat.

Adapun tahapan dari penghitungan dana alokasi umum adalah sebagai berikut :

1. Tahapan akademis, di mana konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.
2. Tahap administratif, di mana dalam tahap ini Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.
3. Tahap teknis, merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilaksanakan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.
4. Tahap politis, merupakan tahap akhir pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

Dalam tahapan perhitungan DAU yang terjabar di atas disinggung mengenai formula DAU, di mana formulasinya adalah sebagai berikut :

- 1) Formula DAU, menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

2) Variabel DAU, di mana komponennya ada dua yaitu :

- a) Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah yang terdiri dari :
 - i. Jumlah penduduk;
 - ii. Luas wilayah;
 - iii. Indek Pembangunan Manusia (IPM);
 - iv. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); dan
 - v. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
- b) Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c) Metode penghitungan DAU, yang terdiri dari :
 - a. Alokasi Dasar (AD), dihitung berdasarkan realisasi gaji pegawai negeri sipil daerah tahun sebelumnya yang meliputi tunjangan-tunjangan dan gaji pokok yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.
 - b. Celah Fiskal (CF), dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional.

Secara implisit, dari uraian-uraian di atas menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksudkan

sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahun.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.²⁸

Daerah tertentu adalah “daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.”

- a. Kriteria umum adalah perumusan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- c. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang didanai dari DAK.

Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *specific grant* merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional pada daerah tertentu. Adapun dasar-dasar hukum yang melandasinya adalah sebagai berikut :

²⁸ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1

- 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjabarkan yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah:²⁹
 - a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya : kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi, prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer.
 - b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK diusulkan oleh Menteri Teknis dan baru ditetapkan setelah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah. Ketetapan tentang kegiatan khusus tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dana alokasi khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.
- 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015, dimana terdapat beberapa kewajiban yang melekat pada daerah penerima DAK, yaitu:³⁰
 - a. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK-nya di dalam APBD;
 - b. Kecuali untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu, daerah penerima DAK wajib mengalokasikan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik; dan

²⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015

- c. Kepala daerah penerima DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah.

Mekanisme dari pengalokasian DAK terbagi atas dua hal yaitu :

1. Kriteria pengalokasian yang terdiri atas :
 - a. Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang mencerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
 - b. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
 - c. Kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.
2. Penghitungan alokasi DAK, yang terbagi dalam dua tahapan yaitu:
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK, dan
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Dalam arah kegiatan pengalokasian DAK tercakup beberapa bidang di dalamnya di antaranya :

- a. DAK bidang pendidikan;
- b. DAK bidang kesehatan;
- c. DAK bidang infrastruktur jalan;

- d. DAK bidang infrastruktur irigasi;
- e. DAK bidang infrastruktur air minum;
- f. DAK bidang infrastruktur sanitasi;
- g. DAK bidang prasarana pemerintah desa;
- h. DAK bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan;
- i. DAK bidang kelautan dan perikanan;
- j. DAK bidang pertanian;
- k. DAK bidang keluarga berencana;
- l. DAK bidang kehutanan;
- m. DAK bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal;
- n. DAK bidang sarana perdagangan;
- o. DAK bidang energi perdesaan;
- p. DAK bidang perumahan dan pemukiman; dan
- q. DAK bidang keselamatan transportasi darat.

Selain itu daerah penerima seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2012, di mana disinggung mengenai dana pendamping, dana tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD. Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis. Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, arah kegiatan DAK adalah DAK bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan desa, dan bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Dapat disimpulkan bahwa DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan APBN. Daerah tertentu yang

dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan kata lain, tidak semua daerah memperoleh Dana Alokasi Khusus. Apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh daerah lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan daerah tersebut maka hal tersebut berarti tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut masih rendah atau dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum mandiri sebab masih bergantung pada DAK dari pemerintah pusat.

3. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.³¹ Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- d. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:
 - 1) kehutanan;
 - 2) pertambangan umum;
 - 3) perikanan;
 - 4) pertambangan minyak bumi;
 - 5) pertambangan gas bumi; dan
 - 6) pertambangan panas bumi.

Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup

³¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1

potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

F. Keuangan Negara Dalam Perspektif Islam

Kitab al-Amwal secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik (*public finance*), analisis yang ia titik beratkan adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah dan Khalifah Rasyidin, terutama Umar bin Khattab sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut *Baitul Mal*. *Baitul Mal* setelah perang badar menurut pendapat yang diunggulkan (*Qaul Rajih*), karena pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*) yang banyak dan pada waktu itu tempat penyimpanan kekayaan negara seperti *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i* adalah mesjid.³²

Setelah melalui perkembangan beberapa saat kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti *kharaj*, *'ursy* dan *khumus*. Mengenai hal ini akan dibahas secara mendalam, namun yang perlu diketahui bahwa dalam *Kitab al-Amwal* banyak harta yang diserahkan kepada Rasulullah yang berasal dari kaum musyrikin.

Pertama adalah *fa'i*, yaitu berupa harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa melalui peperangan. Yang menjadi landasan adalah firman Allah dalam surah al-Hasyr : 6³³

³² Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo :2016.), h.205

³³ Nurul Huda & Ahmad Muti. *Keuangan Publik Islam Pendekatan al-Karaj (Imam Abu Yusuf)*, Bogor: Penerbit Ghalia 2011 Indonesia, h.182

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦)

Artinya: Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.s Al-Hasyr : 6)

Kedua adalah harta *shafi* yang Rasulullah saw pilih dari *ghanimah* yang diberikan kaum muslimin sebelum harta itu dibagikan. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah saw, “Berikanlah dari harta *ghanimah* bagian Rasulullah dan *shafi*”.³⁴

Ketiga, adalah harta 1/5 dari *ghanimah* yang telah dibagi. Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abi ‘Aliyah, ia berkata: “Rasulullah saw mengumpulkan *ghanimah* dan beliau dibagi, ketika ada sesuatu yang jatuh Nabi menempatkannya bagian untuk Ka’bah, bagian untuk Baitullah, kemudian membagi sisa 1/5, untuk Nabi satu bagian, ahli kerabat satu bagian, anak yatim satu bagian, orang miskin satu bagian dan ibnu sabil satu bagian. Abi ‘Aliyah berkata yang Nabi jadikan satu bagian untuk Ka’bah adalah bagian Allah.

Namun yang perlu diketahui bahwa sebagaimana menurut takwil Umar bin-Khattab, ada tiga harta yang masuk dalam keuangan publik, yaitu: *shadaqoh*, *fa’i* dan *khumus*.

Bicara mengenai keuangan publik pada zaman Rasulullah SAW adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, keadaan Madinah sangat kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Kondisi ekonominya masih lemah dan hanya

³⁴ An-Nabhani, Taqyuddin. (*An-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*,) Beirut: Dar al-Ummah 1990, h.138

ditopang dari hasil pertanian.³⁵ Pada masa Rasulullah saw, daulah mempunyai struktur administrasi yang mengurus kemaslahatan publik yang masih sederhana, diantaranya yaitu :³⁶

1. Kepala Negara adalah Rasulullah saw sendiri, dibantu dengan *wazir-wazir* beliau.
2. Amirul Jihad. Kadang Rasulullah saw langsung seperti dalam beberapa *ghozwah*, adapun dalam *saraya* Rasulullah saw tidak menyertainya.
3. Industri, seperti pembuatan mimbar dan lain sebagainya.
4. Peradilan, termasuk didalamnya *hisbah*.
5. Baitul Maal, yaitu lembaga yang mengurus pendapatan dan belanja negara.

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Maal.³⁷ Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan yang bertujuan apa yang disebut sekarang sebagai *welfare oriented*.³⁸ Baitul Mal dapat menjalankan kebijakan fiskal karena sumber penerimaannya tidak terbatas pada zakat saja, namun mencakup pula kharaj (pajak atas tanah), zakat, khums, jizyah dan penerimaan lainnya seperti kaffarah.

Berdirinya Baitul Maal sebagai sebuah lembaga adalah setelah turunnya firman Allah di Badr seusai perang dan saat itu sahabat berselisish tentang Ghanimah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَقِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١)

³⁵ P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 486

³⁶ Hizbu Tahrir, *Ajhizah Daulah*, Beirut, 2005, hal. 29

³⁷ M. Syafe'i Antonio dan Cecep Maskanul Hakim, dalam Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 23

³⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 23

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (Q.s Al-AnFal : 01)

Pada masa rasulullah SAW Baitul Maal terletak di masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara. Karena pada saat itu belum ada tempat yang khusus untuk Baitul Maal, ini disebabkan harta yang masuk belum begitu banyak dan selalu habis dibagikan kepada umat Muslim serta dikeluarkan untuk pemeliharaan urusan negara.

Dalam masalah distribusi pendapatan memegang erat kaitannya antara penerimaan dan pembelanjaan/pengalokasian untuk kepentingan publik. Begitu pula Abu Ubaid dalam Kitab al- Amwal nya begitu jelas dan transparan dalam membahas masalah keuangan publik terkait sekitar masalah penerimaan dan pembelanjaan.

Abu Ubaid menyebutkan kaidah mendasar dalam membatasi orang yang berhak atas kekayaan publik. Dengan menukil pendapat Umar sebagaimana diriwayatkan dari Aslam, ia berkata, *"Telah berkata Umar RA bahwa tidak seorang muslim kecuali hak atas harta menerima atau menolak, setelah itu Umar membacakan surah (al-Hasyr: 7-10) dan berkata Umar: ayat ini memuat semuanya (manusia) dan tidak tersisa seorang muslim kecuali ia mendapat hak akan harta itu (harta fa'i). Menurut riwayat Ibnu Syibah bahwa ketika Umar membentuk dewan membagi para istri Rasulullah saw yang dinikahi 12.000 dirham, bagian juwairiyah dan shafiyah 6.000 dirham (karena keduanya fa'i dari Allah untuk Rasul-Nya) kaum muhajirin syahid Badar masing-masing 5.000 dirham dan kaum anshar yang syahid 4.000 dirham."*³⁹

Selanjutnya, bahwa zakat diambil dari mereka yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu delapan golongan yang

³⁹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. (Jakarta: Karim Business Consulting. 2001).h.237

disebut dalam al-Qur'an. Bagaimanapun pendistribusian harta dalam Islam itu sangat penting dimana Rasulullah telah memberi batasan, yaitu seseorang yang memikul tanggungan (hidup) kaumnya, seseorang yang tertimpa musibah besar dan memusnahkan harta bendanya dan seseorang yang tertimpa kemiskinan.

Dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan *khumus* (*khumus ghanimah*, *khumus*, barang tambang dan *rikaz* serta *khumus* lainnya) adalah ketentuan dari Rasulullah saw dan pendistribusiannya kapan dan untuk siapa tentu juga dengan ketentuan Rasulullah. Karena dana-dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan dan lainnya.

Setelah memutuskan untuk mengakhiri pengepungan benteng Thaif, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam kembali ke Ji’ranah tempat Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyimpan ghanimah (harta rampasan) perang Hunain sebelum berangkat mengepung Thaif.⁴⁰ Setibanya di Ji’ranah, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak langsung membagi harta rampasan perang tersebut kepada para Shahabat yang ikut dalam perang Hunain kecuali perak yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam sengaja menunda pembagian ghanimah ini beberapa hari, dengan harapan akan ada utusan dari kabilah Hawazin yang datang untuk menyatakan taubat dan menerima Islam. Namun ternyata tidak ada yang datang. Akhirnya *ghanimah* dibagikan kepada kaum muhajirin dan para tawanan yang dibebaskan, sementara kaum Anshar tidak mendapatkan bagian sedikitpun.

Pembagian ghanimah seperti ini memantik kemarahan sebagian kaum Anshar sehingga terucap kalimat yang tidak selayaknya diarahkan kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika berita tentang kaum Anshar dan ucapan sebagian mereka terdengar oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumpulkan mereka dan bersabda kepada mereka:⁴¹

⁴⁰ Dinukil dari kitab *as-Sîratun Nabawiyah fî Dhau’il Mashâdiril Ashliyah*

⁴¹ HR. Al-Bukhâri, *al-Fath*, 16/170. no. hadits 4331 dan Imam Muslim, 2/736, no. 1059

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَّغَنِي عَنْكُمْ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَذْهَبُ النَّاسُ بِالْدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ قَالُوا لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا، لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ: فَقَالَ: رَضِينَا، قَالَ

Artinya: Wahai kaum Anshar! Pembicaraan apa ini yang sampai kepadaku dari kalian?! Kaum Anshar terdiam (tidak mampu menjawab). Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam melanjutkan sabdanya, “Wahai kaum Anshar! Apakah kalian tidak rela orang-orang itu pergi dengan membawa dunia sementara kalian pulang membawa serta nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ke rumah-rumah kalian?” Mereka menjawab, “Tentu kami rela, wahai Rasûlullâh!” Perawi mengatakan, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya manusia menempuh satu lembah sementara kaum Anshar menempuh syi’b (jalan atau celah diantara dua pegunungan), maka pasti saya akan mengikuti jalan yang ditempuh kaum Anshar.” (H.R Al-Bukhari)

Kaum Anshar memahami maksud pembagian yang dilakukan oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah mendapatkan penjelasan langsung dari Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun orang-orang Arab badui (pedalaman) yang tidak memahami dan tidak terima dengan sistem pembagian itu. Salah seorang diantara mereka mengatakan kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam :⁴²

يَا عَدِلْ، مُحَمَّدُ، فَقَالَ الرَّسُولُ لَهُ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ أَكُنْ لَقَدْ خَبْتُ

Artinya: “Wahai Muhammad! Bersikap adil!” Rasulullah n bersabda, “Celaka kamu! Siapakah yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil?! Sungguh saya akan merugi jika saya tidak berbuat adil” (H.R Al-Bukhari)

Mendengar kelancangan orang itu, Umar z mendatangi Nabi n dan meminta diijinkan untuk membunuh orang tersebut karena ditengarai sebagai orang munafiq oleh Umar bin Khattab z. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam

⁴² HR. Al-Bukhârî, *al-Fath*, 12/236, no. 3145

tidak menyetujui keinginan Umar bin Khattab Radhiyalahu anhu. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Umar z :⁴³

مَعَاذَ اللَّهِ، أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَتَى أَقْتُلُ أَصْحَابِي

Artinya: Aku berlindung kepada Allah (dari) perkataan sebagai orang yang mengatakan bahwa aku telah membunuh para shahabatku. (H.R Bukhari Muslim)

Orang-orang arab badui ini yang terus berebut dan berdesakan saat Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam membagi ghanîmah, namun Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap sabar menghadapi mereka.

Setelah pembagian harta ghanîmah ini selesai dibagikan kepada orang-orang yang dipandang berhak menerimanya, utusan dari kabilah Hawazin datang menghadap Rasûlullâh menyatakan taubatnya dan menyatakan diri masuk Islam serta meminta agar harta dan para tawanan perang dikembalikan ke mereka. Mereka meminta ini karena harta itu adalah harta mereka yang berpindah tangan ke kaum Muslimin setelah mereka takluk dalam peperangan, sementara para tawanan itu adalah keluarga-keluarga mereka. Mendengar permintaan ini, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi pilihan kepada mereka antara meminta harta atau tawanan perang. Mereka lebih memilih tawanan di kembalikan kepada mereka. Akhirnya, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumpulkan para shahabatnya untuk memusyawarahkan masalah ini. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam meminta para Shahabatnya untuk mengembalikan para tawanan yang menjadi bagian mereka. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan dua opsi kepada para shahabatnya, mengembalikan para tawanan itu dengan sukarela tanpa meminta ganti dari Rasûlullâh atau mengembalikan sembari meminta ganti kepada Rasûlullâh dari ghanîmah yang lain. Semua para Shahabat mengembalikan para tawanan perang yang menjadi bagian mereka kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk

⁴³ HR. Al-Bukhârî, *al-Fath*, 12/238. no. hadits 3148 dan Imam Muslim, 2/733

dikembalikan kepada keluarga mereka dari kabilah Hawazin, kecuali dua orang yang mengembalikan namun meminta ganti.

Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai.

Pengumpulan cukai merupakan kebiasaan pada zaman jahiliah dan telah dilakukan oleh para raja bangsa Arab dan non Arab tanpa pengecualian. Sebab, kebiasaan mereka adalah memungut cukai barang dagangan impor atas harta mereka, apabila masuk ke dalam negeri mereka. Dari Abdurrahman bin Maqil, ia berkata, *“Saya pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair, Siapakah yang telah kalian pungut cukai barang impornya? Ia berkata, “Kami tidak pernah mengenakan cukai atas Muslim dan Mua-hid. Saya bertanya, Lantas, siapakah orang yang telah engkau kenakan cukai atasnya? Ia berkata, “Kami mengenakan cukai atas para pedagang kafir harbi, sebagaimana mereka telah memungut barang impor kami apabila kami masuk dan mendatangi negeri mereka.”*⁴⁴

Dari uraian di atas, Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah dan agama Islam. Lalu, datanglah kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat dari usyur (2.5%). Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, *“Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku supaya mengambil cukai barang impor dari para pedagang kafir harbi sebanyak usyur (10%), barang impor pedagang ahli dzimmah sebanyak setengah dari usyur (5%), dan barang impor pedagang kaum muslimin seperempat dari usyur (2.5%).”*⁴⁵

⁴⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001).h.126

⁴⁵Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*). Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ). h.253

G. Penelitian Terdahulu

TABEL 2.3
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Puput Risky Pramita -Analisis Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Kemandirian Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen (2015) Skripsi	Variabel Independen : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian Variabel Dependel : Kinerja Keuangan Daerah	Deskriptif Kuantitatif	-Kinerja keuangan daerah kabupaten kebumen jika dilihat dari rasio efektivitas PAD tergolong efektif. -Kinerja keuangan daerah kabupaten kebumen jika dilihat dari rasio efisiensi sudah efisien. -Kinerja keuangan daerah kabupaten kebumen jika dilihat dari rasio keserasian masih banyak mengalokasikan belanja operasi dari pada belanja modalnya. -Kinerja keuangan kabupaten Kebumen jika dilihat dari rasio pertumbuhan PAD tumbuh secara Positif.
Raja Assuriyani	Variabel	Statistik	Rasio Kemandirian,

-Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktifitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal (2015) Jurnal	Independen : Rasio Tingkat Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktifitas dan Rasio Pertumbuhan. Variabel Dependen : Belanja Modal	Deskriptif Uji Asumsi Klasik Teknik Analisis Uji Hipotesis	Rasio efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.
Ayu Piradesi -Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah(2009) Skripsi	Variabel Independen : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Daerah	Deskriptif Komparatif	-Analisis rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan sumber daerah terhadap dana eksternal. -Rasio kemandirian tergolong rendah
Arthaingan H Muthia Pengaruh Derajat	Variabel Independen : Derajat	Deskriptif	-Derajat Desentralisasi kota Bogor tergolong mencapai peningkatan.

Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan Terhadap Kinerja Keuangan Studi Pada Kota Bogor Jawa Barat (2016) Jurnal	desentralisasi, Rasio kemandirian, Rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio Pertumbuhan. Variabel Dependen : Kinerja Keuangan		- Rasio kemandirian tergolong konsultatif. -Rasio efektivitas tergolong efektif. -Rasio pertumbuhan menunjukkan PAD yang fluktuatif.
D. Kartika IC Kusuma Analisis Rasio Kemandirian , Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi PAD Terhadap Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi (2015) Jurnal	Variabel Independen : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi PAD. Variabel Dependen : Laporan Realisasi APBD.	Deskriptif	-Kemandirian keuangan kabupaten Sukabumi tahun 2009- 2013 tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif. -Rasio efektifitas PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan kabupaten Sukabumi sangat efektif. -Kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi tergolong cukup efisien.

H. Kerangka Teori



Menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada empat macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang :

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah
- b. Rasio efisiensi keuangan daerah
- c. Rasio keserasian
- d. Rasio pertumbuhan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam kalimat.⁴⁶ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang. Jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010-2018.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari menentukan judul penelitian pada bulan Februari 2019 hingga selesai dilaksanakan.

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov
1	Pengajuan Judul											
2	Bimbingan Proposal											
3	Seminar Proposal											
4	Bimbingan Skripsi											
5	Sidang Munaqasah											

⁴⁶ Conny. R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo, 2010) h.76

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary date*). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) atau data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lainnya. Umumnya data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *pooled data* yaitu kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section*. Data *time series* merupakan sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu, misalnya dalam mingguan, bulanan dan tahunan. Sedangkan data *cross section* adalah sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari www.djpk.depkeu.go.id dan dari sumber-sumber lainnya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informasi mengenai subjek penelitian yang terlibat. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian disertai alasan peneliti memilih subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah **Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara**.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah **APBD Tahun Anggaran 2010-2018 Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara**

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dan laporan dana perimbangan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan mengunduh laporan dari situs www.djpk.depkeu.go.id, <https://sumut.bps.go.id/>.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian telah terkumpul maka dilakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran jawaban atas variabel-variabel yang diteliti dari data yang sudah terkumpul terkait dengan rumusan yang diajukan.

Analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) dan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2010-2018. Dalam penelitian ini teknik analisis rasio keuangan yang digunakan adalah:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi cenderung semakin kecil.

4. Rasio Pertumbuhan (X_4)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

R : Rasio Pertumbuhan

P_n : Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun Ke- n.

P₀ : Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung sebelum tahun ke – 0.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang

1. Geografis

Kabupaten Deli Serdang terletak diantara 2°57" - 3°16" Lintang Utara serta pada 98°33 - 99°27" Bujur Timur merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.497,72 Km² (249,772 Ha) atau merupakan 3,34% dari luas Propinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Deli Serdang secara geografis terletak pada wilayah Pengembangan Pantai Timur Sumatera Utara serta memiliki topografi kontur dan iklim yang bervariasi. Berdasarkan topografi wilayah Deli Serdang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian (Draft Rumah Tangga Miskin Kabupaten Deli Serdang 2005, 2006) yaitu:

- a. Dataran Pantai, meliputi 4 kecamatan (Kecamatan Hampan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Pantai Labu), dengan luas 65.690 ha (26,36% dari luas kab. deli serdang)
- b. Dataran Rendah: meliputi 11 kecamatan (Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, Galang dan Batang Kuis), dengan luas 71.934 ha (28,80 % dari luas kab. Deli Serdang)
- c. Dataran Tinggi: meliputi 7 kecamatan (Kecamatan Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah, Sibolangit, Kutalimbaru dan Bangun Purba), dengan luas 112.147 ha (44,90% dari luas kab. Deli Serdang)

2. Administratif

Secara administratif Wilayah Kabupaten Deli Serdang terbagi dalam 22 wilayah kecamatan, 389 desa dan 14 kelurahan. Jarak antara masing-masing ibukota kecamatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Kota

Lubuk Pakam adalah bervariasi antara 4 hingga 61 kilometer. Ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten adalah Sibolangit dan STM Hulu yakni 61 dan 51 kilometer.

Kabupaten Deli Serdang sebagian besar terletak didaerah pantai Timur Sumatera Utara dan secara umum terletak di ketinggian 0-1000 m diatas permukaan laut, dengan pembagian wilayah berdasarkan elevasi (ketinggian) sebagai berikut :

- a. Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 500 M diatas permukaan laut, Seluas 87,34% dari total terletak diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Gunung Meriah, dengan luas ± 218.157 ha
- b. Daerah perbukitan dengan ketinggian 500 – 1.000 M diatas permukaan laut, seluas 11,50 % dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru dengan luas ± 28.731 ha
- c. Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 M dari permukaan laut, seluas 1,15% dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru dengan luas ± 2.884 ha

Daerah ini, sejak terbentuk sebagai Kabupaten sampai dengan tahun tujuh puluhan mengalami beberapa kali perubahan luas wilayah, hingga tahun 2004 Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan terbentuknya kabupaten baru yakni Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan U.U. No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang menjadi $2.497,72 \text{ KM}^2$, yang mencapai 3.34 persen dari luas Sumatera Utara.

3. Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang

a. Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada tahun-tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2009-2014 adalah :

“ DELI SERDANG YANG MAJU DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS,
SEJAHTERA BERSATU DALAM KEBHINEKAAN MELALUI PEMERATAAN
PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADIL DAN PENEGAKAN
HUKUM YANG DITOPANG OLEH TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK “

b. Misi

Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, perlu dijelaskan arti yang terkandung dalam visi dimaksud melalui beberapa Misi yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Mewujudkan Deli Serdang yang maju adalah mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif.
2. Mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang religius adalah mendorong pembangunan akhlak mulia generasi muda, saling menghormati, rukun dan damai, tidak diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas, dan menghormati hak asasi manusia.
3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sejahtera dan bersatu dalam kebhinekaan adalah mendorong pembangunan yang merata, pemanfaatan sumber daya yang adil guna mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, rasa aman dan damai,

mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, menegakkan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dengan ditopang oleh tata pemerintahan yang baik.

4. Penegakan hukum berarti kelak di dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang tidak boleh ada diskriminasi hukum, semua orang termasuk bupati harus patuh dan taat pada hukum dan perundang-undangan, budaya hukum akan menjadi bagian cara hidup masyarakat Deli Serdang.

4. Institusi dan Organisasi Pemerintahan

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja. Secara lengkap peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah
3. Sekretariat Daerah dengan 3 Assisten yang terdiri dari
 - a. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Asisten Administrasi Umum
4. Sekretariat DPRD dengan 3 Bagian yang meliputi:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Risalah dan Rapat
 - c. Bagian Keuangan
5. Badan Daerah sebanyak 8 SKPD, meliputi:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat

- d. Badan Kesatuan Bangsa
 - e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
 - f. Badan Ketahanan Pangan
 - g. Inspektorat
 - h. Badan Rumah Sakit Umum
6. Dinas Daerah sebanyak 17 SKPD, meliputi :
- a. Dinas Pertanian
 - b. Dinas Perikanan dan Kelautan
 - c. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
 - d. Dinas Kehutanan
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - f. Dinas Kesehatan
 - g. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - h. Dinas Pekerjaan Umum
 - i. Dinas Perhubungan
 - j. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - k. Dinas Pasar
 - l. Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
 - m. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - o. Dinas Sosial
 - p. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - q. Dinas Informasi dan Komunikasi
7. Kantor sebanyak 3 , meliputi:
- a. Kantor Penanaman Modal
 - b. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
 - c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

B. Hasil Penelitian

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota atau Kabupaten pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Yaitu dengan menggunakan beberapa rasio yakni, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Rasio Kemandirian dilihat dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan dana transfer oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, dana transfer memiliki makna yang sama terhadap dana perimbangan. Selanjutnya Rasio Efisiensi dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah. Rasio Keserasian dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara total belanja modal dan total belanja daerah. Sedangkan Rasio Pertumbuhan dalam penelitian ini dilihat dari pertumbuhan anggaran Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian ini, Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sampel penelitian. Berikut adalah hasil Analisis Data Penelitian.

1. Hasil Analisis Rasio Kemandirian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010-2018.

Tabel 4.1
Rasio Kemandirian Kabupaten Deli Serdang

NO	TAHUN	Rasio Kemandirian(%)
1	2010	11,4
2	2011	28,76
3	2012	30,31
4	2013	32,69
5	2014	36,98
6	2015	34,09
7	2016	38,92
8	2017	30,47
9	2018	49,91
RATA-RATA		32,61444444

Sumber : Data diolah, 2019

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah atau dapat dikatakan daerah tersebut semakin mandiri, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan tabel 4.1 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2010- 2018 Rasio Kemandirian menunjukkan kriteria rendah. Yang berarti bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih bergantung pada pihak ekstern atau Pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten Deli Serdang pada tahun 2010-2018 memiliki pola hubungan Konsultatif, karena peranan Pemerintah Pusat mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap telah sedikit dapat melaksanakan otonomi daerah.

Pada tahun 2010 kemandirian kabupaten Deli Serdang sebesar 11,4% kemudian mengalami kenaikan sekitar 17% menjadi 28,76% di tahun 2011 dan naik lagi 2% pada tahun pada tahun 2012, dan juga mengalami kenaikan atau dapat dikatakan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 2%. Namun, pada tahun 2014 kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4% sehingga prosentase kemandirian kabupaten Deli Serdang menjadi 36,98%. Pada tahun 2015-2018 tingkat kemandirian kabupaten Deli

Serdang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 tingkat kemandirian menurun sekitar 2% dari tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan sekitar 4% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 30,47%.

Pada tahun 2018 peningkatan kemandirian keuangan kabupaten Deli Serdang meningkat secara signifikan menjadi 49,91%. Ini menandakan bahwa tingkat kemandirian kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari tahun 2010-2018. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya sektor pendapatan asli daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemandirian daerah kabupaten Deli Serdang, dan pemerintah kabupaten Deli Serdang dapat mengelola keuangan daerah dengan baik. Meskipun begitu, pada tahun 2018 kabupaten Deli Serdang tetap memiliki pola hubungan Konsultatif, yang artinya dianggap sedikit mampu dalam mengelola otonomi daerah.

2. Hasil Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010-2018

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi Kabupaten Deli Serdang

NO	TAHUN	Rasio Efisiensi(%)
1	2010	379,34
2	2011	762,48
3	2012	618,96
4	2013	619,65
5	2014	551,35
6	2015	530,88
7	2016	524,49
8	2017	397,71
9	2018	469,07
RATA-RATA		539,325556

Sumber : Data diolah, 2019

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%.

Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Berdasarkan tabel 4.2 menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2010-2018 tidak efisien dalam mengelola keuangan daerahnya karena biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih tinggi daripada pendapatan yang diterimanya. Berbeda dengan rasio kemandirian, untuk rasio efisiensi jika nilai semakin besar maka dikatakan semakin tidak efisien. Pemerintah kabupaten Deli Serdang tahun 2010-2018 cenderung tinggi dalam realisasi belanja daerah dari pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2011 kabupaten ini memiliki tingkat efisiensi tertinggi dengan prosentase sebesar 762,48%. Padahal seharusnya pendapatan yang diterima pemerintah kabupaten lebih besar dari pada pengeluaran yang terjadi.

Pada tahun 2010 rasio efisiensi terendah kabupaten Deli Serdang sebesar 379,34%, hal ini menandakan bahwa ketidak efisienannya pengelola merealisasikan belanja daerah. Dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan yang signifikan. Dan tahun 2014-2018 mulai menstabilkan belanja daerah meskipun kategori efisiensi masih sangat jauh yakni tahun 2014 sekitar 551,35%, tahun 2015 530,88%, tahun 2016 524,49% dan ditahun 2017-2018 yakni sekitar 397,71% dan 469,07%. Hal ini menjadi tanggung jawab besar kepada kepala daerah untuk lebih mampu mengelola keuangan secara efisien. Terbukti karena pengeluaran yang terjadi justru semakin besar dari pada pendapatan yang diterima oleh daerah.

3. Hasil Analisis Rasio Kesenjangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010-2018

Tabel 4.3
Rasio Kesenjangan Kabupaten Deli Serdang

NO	TAHUN	Rasio Kesenjangan(%)
1	2010	18,98
2	2011	19,3
3	2012	18,55
4	2013	17,31
5	2014	23,14
6	2015	17,97
7	2016	18,67
8	2017	21,95
9	2018	19,59
RATA-RATA		19,49555556

Sumber : Data diolah, 2019

Ada dua perhitungan dalam rasio kesenjangan ini, yaitu : rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Dalam hal ini berdasarkan tabel 4.3 perhitungan rasio kesenjangan, penulis menggunakan rasio belanja modal. Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa Rasio Kesenjangan kabupaten Deli Serdang tahun 2010-2018 menunjukkan tingkat proporsional secara umum. Pada tahun 2010 menunjukkan tingkat kesenjangan kabupaten Deli Serdang sebesar 18,98% dan dikategorikan sesuai dengan proporsinya. Dan kemudian begitupun pada tahun 2011-2013. Namun pada tahun 2014 menunjukkan tingkat kesenjangan tertinggi yaitu sebesar 23,14%. Ini menandakan

bahwa, pada tahun 2014 proporsi belanja modal tidak sesuai, sebab proporsi secara umum adalah sebesar 5-20%.

Pada tahun 2015-2016 rasio keserasian mulai cenderung stabil yakni sebesar 17,97% dan 18,67%. Akan tetapi pada tahun 2017 rasio keserasian mulai tidak stabil yakni sebesar 21,95%. Dan pada tahun 2018 sebesar 19,59%. Ini menunjukkan bahwa secara umum rasio keserasian kabupaten Deli Serdang tahun 2010-2018 sesuai dengan proporsinya meskipun bergerak secara fluktuatif, kabupaten Deli Serdang mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik.

4. Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan kabupaten Deli Serdang tahun 2010-2018

Tabel 4.4
Rasio Pertumbuhan Kabupaten Deli Serdang

NO	TAHUN	Rasio Pertumbuhan (%)
1	2010	12,79
2	2011	159
3	2012	26,62
4	2013	22,35
5	2014	21,86
6	2015	11,3
7	2016	6,58
8	2017	-1,43
9	2018	51,05
RATA-RATA		34,45777778

Sumber : Data diolah, 2019

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan

pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata kemampuan pemerintah kabupaten Deli Serdang 2010-2018 dalam rasio pertumbuhan sekitar 35,45%. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten Deli Serdang telah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerahnya. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar -1,43% hal ini disebabkan total pendapatan asli daerah yang cenderung jauh dari yang diharapkan pada periode sebelumnya. Namun pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 159%. Ini pertanda bahwa pengelolaan sumber pendapatan asli daerah sangat baik.

Pada tahun 2012-2014 rasio pertumbuhan cenderung stabil yakni sebesar 26,62% , 22,35% ,dan 21,86%. Dan pada tahun 2015-2018 cenderung fluktuatif disebabkan sumber pendapatan asli daerah yang tidak stabil pergerakannya. Kabupaten yang memiliki tingkat prosentase rendah berarti kurang mampu mengelola keuangan daerahnya atau mengalokasikan pendapatan yang dimiliki daerahnya masing-masing. Sehingga kabupaten tersebut tidak mampu secara maksimal dalam mempertahankan pendapatan daerahnya atau mengembangkan potensi daerah yang dimiliki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Deli Serdang tahun 2010-2018 menggunakan rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan setiap rasio keuangan daerah.

1. Dalam rasio kemandirian kabupaten Deli Serdang, pada tahun 2014 kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4% sehingga prosentase kemandirian kabupaten Deli Serdang menjadi 36,98%. Pada tahun 2015-2018 tingkat kemandirian kabupaten Deli Serdang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 tingkat kemandirian menurun sekitar 2% dari tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan sekitar 4% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 30,47%. Tingkat kemandirian terendah terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 11,4%. Namun secara rata-rata, kemandirian keuangan kabupaten Deli Serdang sebesar 32,61444444%. Ini menandakan bahwa kinerja keuangan kabupaten Deli Serdang dilihat dari rasio kemandirian masih tergolong rendah karena menganut pola konsultatif. Seharusnya rasio kemandirian berada diatas 40%.
2. Berdasarkan rasio efisiensi, Pemerintah kabupaten Deli Serdang tahun 2010-2018 cenderung tinggi dalam realisasi belanja daerah dari pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2011 kabupaten ini memiliki tingkat efisiensi tertinggi dengan prosentase sebesar 762,48%. Padahal seharusnya pendapatan yang diterima pemerintah kabupaten lebih besar dari pada pengeluaran yang terjadi. Pada tahun 2010 rasio efisiensi terendah kabupaten Deli Serdang sebesar 379,34%, hal ini menandakan bahwa ketidak efisiensinya pengelola merealisasikan belanja daerah. Dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan yang signifikan. Dan tahun

2014-2018 mulai menstabilkan belanja daerah meskipun kategori efisiensi masih sangat jauh yakni tahun 2014 sekitar 551,35%, tahun 2015 530,88%, tahun 2016 524,49% dan ditahun 2017-2018 yakni sekitar 397,71% dan 469,07%. Hal ini menjadi tanggung jawab besar kepada kepala daerah untuk lebih mampu mengelola keuangan secara efisien. Terbukti karena pengeluaran yang terjadi justru semakin besar dari pada pendapatan yang diterima oleh daerah dan menandakan bahwa kinerja keuangan kabupaten Deli Serdang dilihat dari rasio efisiensi masih kurang baik. Dimana seharusnya efisiensi berada di posisi $<100\%$.

3. Rasio Kesenjangan kabupaten Deli Serdang tahun 2010-2018 menunjukkan tingkat proporsional secara umum. Pada tahun 2010 menunjukkan tingkat kesenjangan kabupaten Deli Serdang sebesar 18,98% dan dikategorikan sesuai dengan proporsinya. Dan begitupun pada tahun 2011-2013. Namun pada tahun 2014 menunjukkan tingkat kesenjangan tertinggi yaitu sebesar 23,14%. Ini menandakan bahwa, pada tahun 2014 proporsi belanja modal tidak sesuai, sebab proporsi secara umum adalah sebesar 5-20%. Pada tahun 2015-2016 rasio kesenjangan mulai cenderung stabil yakni sebesar 17,97% dan 18,67%. Akan tetapi pada tahun 2017 rasio kesenjangan mulai tidak stabil yakni sebesar 21,95%. Dan pada tahun 2018 sebesar 19,59%. Ini menunjukkan bahwa secara umum rasio kesenjangan kabupaten Deli Serdang tahun 2010-2018 sesuai dengan proporsinya meskipun bergerak secara fluktuatif, kabupaten Deli Serdang mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik sehingga berdasarkan rasio kesenjangan Kabupaten Deli Serdang memiliki kinerja keuangan yang cukup baik.
4. Rata-rata kemampuan pemerintah kabupaten Deli Serdang 2010-2018 dalam rasio pertumbuhan sekitar 35,45%. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten Deli Serdang telah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerahnya. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar -1,43% hal

ini disebabkan total pendapatan asli daerah yang cenderung jauh dari yang diharapkan pada periode sebelumnya. Namun pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 159%. Ini pertanda bahwa pengelolaan sumber pendapatan asli daerah sangat baik. Pada tahun 2012-2014 rasio pertumbuhan cenderung stabil yakni sebesar 26,62% , 22,35% ,dan 21,86%. Dan pada tahun 2015-2018 cenderung fluktuatif disebabkan sumber pendapatan asli daerah yang tidak stabil pergerakannya.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian di Pemerintah kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pengamatan penulis menyampaikan saransaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari analisis rasio kemandirian dan rasio efisiensi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan tingkat pendapatan asli daerah.
2. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keserasian, pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan proporsional kinerja secara umum.
3. Berdasarkan hasil dari analisis rasio pertumbuhan, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian dan menambah rentan periode waktu penelitian serta menambahkan jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bakr, Muhammad Abd al-Rahman, 1998, *Al-Sultah al-Qadla''iyah wa al-Syakhsiyah al-Qadli*, Kairo: al-Zuhkra' li A'lam al-Arabi, 1998
- Agustina, Oesi, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang", *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2013
- Arfan Ikhsan, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan, Cita Pustaka, 2014
- Ayu Piradesi, "Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. 2009
- Arthaingan Muthia, "Pengaruh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan Terhadap Kinerja Keuangan Studi Pada Kota Bogor Jawa Barat". *Jurnal*. 2016
- Bratakusumah dan Solihin, Jakarta, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka*, 2002
- Bratakusumah dan Solihin, Jakarta, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka*, 2002
- Diaz, Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2012
- D. Kartika IC Kusuma, "Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi PAD Terhadap Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi". *Jurnal*. 2015.
- Halim, Abdul, *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UMP AMP YKN, 2001
- _____, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi Ketiga, 2007
- Hizbu Tahrir,. *Ajhizah Daulah*, Beirut, 2005
- Karim, Adiwarman,. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet. IV, Yogyakarta: Bagaskara, 2012
- Raja Assuriyani, "Anlisis Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktifitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal". *Jurnal*. Universitas Sumatera Utara. 2015
- Kuncoro, Mudarajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta, Erlangga, 2004
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Erlangga, 2010

- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Edisi Dua*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010
- Malik, Abdul, Sirah *Nabawiyah Ibnu Hisyam*, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Masyhuri, dkk, *Kajian Teori Ekonomi dalam Islam*, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , 2003
- Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Muhtadi, Mohamad. —*Evaluasi Pengelolaan Keuangan Publik pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya dengan Masa Kekinian dalam perspektif Islam*”, Program Pascasarjana UI, 2009
- Mohamad Mahsun. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : BPFE, 2012
- Ulum, Ihyahul. *Audit Sektor Publik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009
- Parwataatmadja, Karnaen. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Mohamad, 2002
- Puput Risky Pramita ,“Analisis Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Kemandirian Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* , Universitas Sumatera Utara, 2015
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- Republik Indonesia , *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan*, 1974
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, 1999
- Republik Indonesia, *PP No. 105 Tahun 2000 tentang penerimaan dan pengeluaran daerah 2000*
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Prinsip-prinsip otonomi daerah* 2004
- Republik Indonesia, *Pasal 1 ayat 21 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum*, 2004
- <https://www.hestanto.web.id/penerimaan-pajak>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Perimbangan

LAMPIRAN

Lampiran 1

DATA REALISASI APBD KAB. DELI SERDANG (Dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN ANGGARAN

No	Jenis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PAD	120.537	213.792	291.018	328.348	433.885	515.293	573.010	849.286	729.648
2	Transfer Pusat	1.025.331	1.064.006	1.237.551	1.401.726	1.524.671	1.565.271	1.974.004	1.987.560	1.992.298
3	Belanja Modal	86.821	314.746	334.254	352.334	553.705	491.710	561.285	741.456	670.584
4	Belanja Operasi	370.426	1.314.771	1.465.594	716.231	1.003.758	1.034.596	1.137.715	1.509.357	1.520.403
5	Belanja Daerah	457.247	1.630.139	1.801.287	2.034.622	2.392.252	2.735.624	3.005.435	3.377.738	3.422.610

DATA APBD KAB. DELI SERDANG (Dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN ANGGARAN

No	Jenis	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PAD	115.879	300.134	380.055	465.000	566.665	630.721	672.229	662.615	1.000.927
2	Transfer Pusat	1.013.582	1.043.402	1.253.737	1.422.095	1.532.265	1.849.930	1.726.806	2.174.505	2.005.268
3	Belanja Modal	227.207	345.695	415.159	528.873	768.167	883.583	763.542	647.202	697.679
4	Belanja Operasi	506.126	707.332	1.017.528	1.261.700	1.409.949	1.640.548	1.496.882	1.480.235	1.688.379
5	Belanja Daerah	1.320.132	1.320.132	2.036.654	2.383.194	2.818.272	3.260.500	3.529.117	3.497.039	3.766.358

Lampiran 2

Hasil Pengolahan Data

NO	TAHUN	Rasio Kemandirian	Rasio Efisiensi	Rasio Keserasian	Rasio Pertumbuhan
1	2010	11,4	379,34	18,98	12,79
2	2011	28,76	762,48	19,3	159
3	2012	30,31	618,96	18,55	26,62
4	2013	32,69	619,65	17,31	22,35
5	2014	36,98	551,35	23,14	21,86
6	2015	34,09	530,88	17,97	11,3
7	2016	38,92	524,49	18,67	6,58
8	2017	30,47	397,71	21,95	-1,43
9	2018	49,91	469,07	19,59	51,05
Rata-Rata		32,61444444	539,3255556	19,49555556	34,45777778